

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauana Umum tentang Konstruksi Hukum**

##### **A.1 Pengertian Konstruksi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh kostruksi dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>14</sup> Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (construction meaning) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.<sup>15</sup> Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).<sup>16</sup>

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar : proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

---

<sup>14</sup>Alwi, hasan. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: PT. Balai Pustaka

<sup>15</sup>Suwandi, Sarwiji. 2008. Semantik Pengantar Kajian Makna. Yogyakarta: Media Perkasa

<sup>16</sup>Pusat Bahasa (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka

## A.2 Pengertian Konstruksi Hukum

Penemuan hukum juga dikenal metode argumentasi atau lebih dikenal dengan konstruksi hukum, metode ini digunakan ketika dihadapkan kepada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) Berdasarkan asas *ius curia novit* (hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalil hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya) maka metode konstruksi hukum ini sangat penting demi menjamin keadilan. Metode-metode konstruksi hukum itu dapat dibagi sebagai berikut :

### 1. Metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi)

Analogi merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. sehingga metode analogi ini menggunakan penalarana induksi yaitu berfikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum

### 2. Metode *Argumentum a Contrario*

Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Karena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-

undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang. Jadi metode ini mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

### 3. Metode Penyempitan Hukum

Kadang-kadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-kecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan member ciri-ciri.

## **B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana**

### **B.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang dan ada sikap jahat.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Mahsur Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 156

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah adatindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana padahakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untukbereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatantertentu.

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum atau bersifat melawanhukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalamundang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana orang yang melakukan kesalahan atau bersalah, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuanuntuk

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.

- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan dan kecakapan<sup>18</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengandilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulistidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>19</sup> Berbeda dengan halnya istilah “tidak dapat dipertanggungjawabkan”, ini dengan pernyataan mengapa seseorang dengan daya pikir yang kurang beres tidak pantas dicela dan dihukum, karna orang tersebut kurang berdaya untuk menentukan kemauannya.<sup>20</sup>

## **B.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

### **a. Mampu bertanggung jawab**

Mampu bertanggungjawab merujuk kepada kemampuan pelaku atau pembuat. Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yakni dapat dipertanggungjawabkan pembuat.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan mengingat asas tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, maka

---

<sup>18</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 108.

<sup>19</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.37

<sup>20</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 96.

pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.<sup>21</sup>

Menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur mampu bertanggungjawab mencakup :

- 1) Keadaan jiwanya :
  - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
  - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot dan sebagainya);
  - c) Tidak terganggu karena terheut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*kooris*, *nyidam*, dan lain sebagainya. Dengan kata lain yang bersangkutan dalam keadaan sadar.
- 2) Kemampuan jiwanya :
  - a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
  - b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut dan
  - c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>22</sup>

## **b. Kesalahan**

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau

<sup>21</sup>Chairul Huda “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ‘Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 89

<sup>22</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012, hlm. 76

akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.<sup>23</sup>

Menurut Moeljatno, untuk adanya kesalahan terdakwa harus memuat unsur:

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- 2) Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab ;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan tidak adanya alasan pemaaf.<sup>24</sup>

#### **c. Tidak ada alasan pemaaf**

Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Kesalahan yang dimaksud melingkupi kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*). Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah :

- a. Daya paksa relatif;
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) KUHP;
- c. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.<sup>25</sup>

### **B.3 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat ditemukan tiga model pertanggungjawaban sebagai berikut :

---

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm.77

<sup>24</sup>Chairul Huda, *Op Cit*, hlm. 65

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm 65.

1. **Pertama**, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. Gagasan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena penguruslah yang akan selalu dianggap sebagai pelaku dari delik tersebut.
2. **Kedua**, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Jadi model ini menyadari bahwa korporasi sebagai pembuat namun untuk pertanggungjawabannya diserahkan kepada pengurus.
3. **Ketiga**, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Model ini memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, karena ternyata hanya dengan menetapkan pengurus sebagai yang bertanggung jawab, tidaklah cukup.<sup>26</sup>
4. **Keempat**, Pengurus dan Korporasi sebagai Pembuat Tindak Pidana dan Pengurus Bersama Korporasi yang Bertanggung jawab secara pidana. Penjatuhan pidana kepada pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Oleh karena itu diperlukan pula untuk memidana korporasi dan pengurusnya.

---

<sup>26</sup>Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, BayuMedia, Malang, hlm. 12-14.



Pertanggungjawaban pidana korporasi, pada dasarnya ada lima teori yang berhubungan dengan itu.

### 1. Doktrin Identification Theory

Pendapat mengenai *identification theory* serupa juga dikemukakan oleh Muladi dalam bukunya. Muladi mengemukakan bahwa melalui doktrin identifikasi, sebuah perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan sendiri.<sup>79</sup> Dalam hal ini maka perbuatan atau kesalahan dari “pejabat senior” (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan dari korporasi.<sup>27</sup>

Definisi dari “pejabat senior” (*senior officer*) melahirkan beberapa pendapat. Secara umum, yang dimaksud “pejabat senior” adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri, maupun bersama-sama, yang pada umumnya adalah direktur dan manajer. Hakim Reid dalam perkara *Tesco Supermarket Ltd. vs Nattrass* tahun 1972 mencoba mendefinisikan siapa yang dimaksud “pejabat senior”.

Dari pertimbangannya tersebut, pada intinya adalah bahwa:

- 1) Untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari “dewan direktur, direktur pelaksana, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan.”

---

<sup>27</sup>Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 105

- 2) Pejabat senior tidak mencakup “semua pegawai perusahaan yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat tinggi perusahaan.”

Sementara itu, Lord Morris berpendapat bahwa “pejabat senior” adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari “*the directing mind and the will of the company*”. Adalagi Lord Diplock yang berpendapat bahwa “pejabat senior” adalah mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan-ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau keputusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya untuk melaksanakan kekuasaan perusahaan. Meski demikian, dari pendapat-pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa “pejabat senior” adalah individu dengan jabatan tinggi dan memiliki kewenangan yang besar.

Sutan Remy S. memiliki pandangannya sendiri dalam menentukan “*directing mind*”. Menurutny, cara menentukan individu sebagai “*directing mind*” adalah dengan melihatnya secara formal yuridis, dimana salah satunya melalui anggaran dasar korporasi tersebut atau surat-surat keputusan yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan. Selain itu juga perlu melihatnya secara kenyataan dalam operasional kegiatan korporasi tersebut kasus demi kasus. Hal ini dikarenakan, pada beberapa kasus, ternyata individu yang secara legal memiliki jabatan dengan kewenangan sebagai “*directing mind*”, masih

juga dapat dipengaruhi oleh individu-individu lain dengan jabatan yang secara yuridis tidak memiliki kewenangan, seperti pemegang saham mayoritas dengan kedekatan tertentu. Karenanya, menurut Sutan Remy S. “*directing mind*” tidak terbatas pada jabatan-jabatan tertentu yang memiliki kewenangan secara formal yuridis, melainkan juga jabatan lain yang secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan, akan tetapi secara faktual berpengaruh.<sup>28</sup>

Jika melihat penggunaan dari doktrin identifikasi ini, maka doktrin ini lebih ditujukan kepada pengurus dari korporasi dengan jabatan tinggi seperti direktur atau *high level manager*, karena kewenangan dalam bertindak untuk dan atas nama korporasi pada dasarnya hanya terdapat pada tingkatan jabatan tersebut. Hal ini akan berimbas pada korporasi hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh direktur atau top manajer, tanpa mengkomodir perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang berada di luar korporasi.<sup>29</sup>

Dengan demikian, doktrin identifikasi ini merupakan doktrin yang memungkinkan korporasi memiliki suatu pertanggungjawaban pidana dengan dasar suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu yang diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Agar individu tersebut dapat diidentifikasi sebagai korporasi, maka individu

---

<sup>28</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 100

<sup>29</sup>*Ibid*

tersebut harus bertindak sebagai *directing mind*. Menentukan *directing mind* dapat dilakukan dengan melihat fakta-fakta pada kasus seperti kedudukan dari individu tersebut atau wewenang yang dimiliki sehingga dapat dianggap bahwa perbuatannya memanglah perbuatan perusahaan. Wewenang yang sedemikian besarnya pada umumnya terdapat pengurus dengan jabatan-jabatan tinggi seperti *high level manager* atau direksi. Karenanya doktrin ini dalam penerapannya tidak mengakomodir perbuatan yang dilakukan oleh pegawai jabatan rendah.<sup>30</sup>

## 2. Doktrin Strict Liability

Dalam hukum pidana, doktrin *strict liability* merupakan doktrin yang mengesampingkan unsur kesalahan atau unsur *mens rea* dalam petanggungjawaban pidana. Lebih jelasnya *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *strict liability crime* sebagai “*a crime that does not require a mens rea element, such as traffic offenses and illegal sales of intoxicating liquor.*” Dari definisi yang dikemukakan oleh *Black's Law Dictionary* tersebut jelas menunjukkan bahwa doktrin *strict liability* menyimpangi asas utama dalam hukum pidana yakni asas kesalahan atau asas *mens rea*.

Penyimpangan terhadap asas kesalahan atau asas *mens rea* dalam doktrin ini dikarenakan, doktrin *strict liability* memandang dalam pertanggungjawaban pidana cukup dibuktikan bahwa pelaku

---

<sup>30</sup>Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 236

tindak pidana telah melakukan perbuatan atau *actus reus* yang merupakan perbuatan yang memang dilarang. Sedangkan untuk *mens rea* dipandang sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak. Hal ini didasarkan pada fakta yang bersifat menderitakan si korban cukup untuk menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pada pelaku sesuai maxim "*res ipsa loquitur*" atau fakta sudah berbicara sendiri. Diadopsinya doktrin *strict liability* kedalam hukum pidana, lebih didasarkan pada alasan praktis. Hal ini dapat dilihat dari pengesampingan unsur kesalahan atau *mens rea* dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada individu. L.B. Curson berpendapat bahwa alasan-alasan berlakunya doktrin ini didasarkan pada:

1. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
2. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu.
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Pendapat serupa dikemukakan pula oleh Ted Honderich. Ia menambahkan alasan lain yakni *Strictliability* hanya diberlakukan untuk tindak pidana ringan.

Dengan diadopsinya doktrin *strict liability* kedalam hukum pidana, yang mana doktrin tersebut menyimpangi asas fundamental yakni asas kesalahan atau *asasmens rea*, maka keberlakuan dari doktrintersebut perlu ditentukan. Di Inggris misalnya, keberlakuan dari doktrin tersebut dibatasi hanya oleh undang-undang-undang yang menyatakan demikian.<sup>126</sup> Sedangkan di *Common Law*, delik-delik *strictliability* berlaku pada delik-delik berkaitan dengan *public nuisance*, *criminal libel*, dan *contempt of court*.

Dalam menjawab batas keberlakuan doktrin ini, Muladi dan Dwidja Priyatno berpendapat, bahwa terkait penerapan doktrin *strict liability*, sebaiknya hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan, seperti pelanggaran lalu lintas.<sup>128</sup> Menurut Loebby Luqman, penerapan doktrin ini sebenarnya sudah dilakukan pada delik pelanggaran lalu lintas.<sup>129</sup> Hal ini dikarenakan, Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak akan mempersoalkan ada tidaknya kesalahan pada pengemudi yang melanggar peraturan tersebut. Sedangkan untuk korporasi, dapat diterapkan untuk meminta pertanggungjawaban pada delik-delik yang menyangkut perlindungan terhadap kepentingan umum, seperti kesehatan lingkungan hidup.

Dalam R-KUHP revisi 2015, doktrin *strict liability* merupakan salah satu doktrin yang dimungkinkan diberlakukan untuk delik-delik tertentu. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 39 ayat (1) yang mengatur bahwa:

*“Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan”<sup>31</sup>*

Meski tidak disebutkan dalam Pasal tersebut bahwa pengaturan tersebut merupakan bentuk doktrin *strict liability*, akan tetapi dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa pemberlakuan tersebut merupakan bentuk pemberlakuan asas *strict liability*.

Dengan demikian, doktrin *strict liability* merupakan doktrin yang memandang kesalahan atau *mens rea* sebagai unsur yang tidak relevan untuk dipertimbangkan. Atau dengan kata lain mengesampingkan unsur kesalahan. Dalam penerapannya, doktrin ini tetap harus dibatasi berdasarkan peraturan yang menyatakan keberlakuan doktrin ini. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat atas hak-hak fundamental. Doktrin ini sebaiknya diterapkan untuk tindak pidana yang ringan. Sedangkan terhadap korporasi, doktrin ini dapat diterapkan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan umum atau masyarakat.

---

<sup>31</sup>Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana revisi 2015

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana merupakan sebuah serangkaian proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.<sup>32</sup>

Dari beberapa uraian yang telah penulis utarakan diatas maka korporasi atau perusahaan adalah subjek hukum di mata hukum, dan karenanya mampu melakkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum orang atau manusia, seperti melakukan kontrak, memiliki kekayaan, sehingga sudah seharusnya korporasi harus dapat mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Muladi juga mengatakan bahwa dengan diterimanya korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dimana dapat bertindak dalam lalu lintas hukum. Melalui penerapan teori identifikasi dan teori fungsi sosial terhadap korporasi adalah sangat mendukung bagi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa pembedaan terhadap korporasi sudah tidak dipermasalahkan kembali.<sup>33</sup>

Pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri karena di samping terkait dengan suatu jenis perbuatan yang dilarang oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, juga

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm 47.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm 47.



berhubungan dengan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan terlebih dahulu harus menentukan siapa yang merupakan subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindakan yang dimana tindakan itu dilarang oleh undang-undang dan memiliki dasar yang dapat dipidana.

“Dalam sistem hukum pidana, terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menentukan dasar-dasar yang patut agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seperti teori pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*Liability based on fault*). Teori ini pada prinsipnya mengatakan bahwa setiap subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila terlebih dahulu dapat dibuktikan dengan adanya suatu kesalahan atau yang dikenal dengan istilah *Mens Rea* dengan mengidentifikasi suatu kesalahan yang dilakukan oleh korporasi melalui cara mengaitkan perbuatan *Mens Rea* para individu yang mewakili korporasi selaku *directing mind* atau *alert ego*.

### 3. Doktrin Vicarious Liability

Doktrin *vicarious liability* merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi lainnya yang diadopsi dari hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat *doctrine of respondeat superior*, dimana ada hubungan antara *employee* dengan *employer* atau *principal* dengan *agents*, dan berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*, yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatannya. Doktrin ini biasanya diterapkan terkait dengan perbuatan melawan hukum (*the law of tort*). Dalam perbuatan-perbuatan perdata, diatur mengenai hubungan atasan dan bawahan

atau pekerja dan pemberi kerja, dimana pemberi kerja bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya. Sehingga apabila terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh pekerja sehingga mengakibatkan kerugian salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat menggugat pemberi kerja atau atasannya untuk bertanggungjawab. Akan tetapi pertanggungjawabannya tersebut terbatas sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh pekerja atau bawahannya tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan atau kewenangannya serta dapat dibuktikan pertanggungjawabannya.

Lord Russell LJ, seorang hakim di Inggris berpendapat bahwa, berdasarkan doktrin *vicarious liability*, seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau kuasanya apabila:

*“... the conduct constituting the offence was pursued by such servant (employees) and agents within the scope or in the course of their employment.”<sup>34</sup>*

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Lord Russell tersebut, maka terdapat batasan dalam hal penerapan doktrin *vicarious liability*, bahwa seorang pemberi kerja hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan pegawainya adalah dalam rangka tugas dalam ruang

---

<sup>34</sup>Lihat pada kasus *Cooppen v Moore (No 2) [1898] 2 QB 306*

lingkup pekerjaannya. Secara *a contrario*, maka doktrin ini tidak dapat diterapkan apabila perbuatan yang dilakukan pekerja (*employee*) di luar atau tidak ada hubungannya dengan tugasnya.

Doktrin ini menuai banyak kritik dari para Sarjana karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum pidana. Salah satunya adalah pengesampingan unsur kesalahan, dimana seseorang dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Oleh Boisvert dikatakan bahwa doktrin ini secara jelas menyimpang dari doktrin *mens rea* dikarenakan doktrin ini berpendirian bahwa kesalahan manusia secara otomatis begitu saja diatribusikan kepada pihak lain yang tidak melakukan kesalahan.<sup>35</sup>

Meski demikian, doktrin ini juga dianggap telah menyelesaikan beberapa permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Seperti pada doktrin *identification theory* yang lebih ditujukan pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau *high level manager*,<sup>157</sup> maka doktrin *vicarious liability* ini juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawai rendahan. Doktrin ini juga dapat mencakup perbuatan yang

---

<sup>35</sup> Anne-Marie Boisvert, *Corporate Criminal Liability*, sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy S., *Ibid.*,

dilakukan oleh orang yang berada di luar organisasi korporasi, selama terhadapnya diadakan suatu hubungan pekerjaan. Hal ini dikarenakan luasnya ruang lingkup hubungan subordinasi dalam *vicarious liability* selama antara kedua belah pihak tersebut terdapat hubungan pekerjaan dan terbatas pada atribusi tugas yang diberikan.

Selain itu doktrin ini juga bermanfaat dalam hal melakukan pencegahan. Menurut Low, pencegahan ini dilakukan karena seorang pemberi kerja dianggap bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh pekerjanya selama hal tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan. Dengan demikian, perusahaan sebagai pemberi kerja akan memantau apa yang dilakukan pekerjanya guna mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana.<sup>36</sup>

Melalui doktrin *vicarious liability*, maka korporasi dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberikan atribusi tugas oleh korporasi berdasarkan suatu hubungan pekerjaan. Hal ini tidak tertutup bagi pekerja yang berada di dalam organ perusahaan, melainkan juga agen-agen atau wakil yang berada di luar organ perusahaan, dengan batasan selama perbuatan yang dilakukan oleh pekerja, agen, atau wakil tersebut terbatas pada ruang lingkup pekerjaan atau atribusi yang diberikan

---

<sup>36</sup>Sutan Remy S., *Op.cit.*, hlm. 92

kepada pekerja atau agen tersebut. Penerapan doktrin *vicarious liability* harus dibatasi, karena doktrin ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap *asasmens rea* dalam hukum pidana. Penerapan hanya dapat dilakukan apabila undang-undang secara tegas memperbolehkannya

#### 4. Teori Pelaku Fungsional (Functioneel Daderschap)

Teori lain mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi adalah Teori pelaku fungsional. Teori ini merupakan teori yang berkembang dari negara Eropa Kontinental. Teori pelaku fungsional atau *functioneel daderschap* pertama kali dikemukakan oleh Roling dalam catatannya di bawah putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari dan 21 Februari 1950.<sup>160</sup> Menurutya, merujuk pada Pasal 15 *Wet Economische Delicten*, korporasi juga dapat melakukan delik-delik selain dari delik ekonomi, jika melihat dari fungsinya dalam masyarakat.

Ter Heide dalam melihat teori pelaku fungsional ini, mengawalinya dengan pendekatan sosiologis yang melihat adanya kecenderungan dalam hukum pidana untuk semakin terlepas dari konteks manusia. Dengan demikian prinsip hanya manusia sebagai subjek hukum perlahan mulai disimpangi. Selanjutnya Ter Heide juga melihat adanya peran serta korporasi dalam suatu masyarakat hingga dapat mengubah situasi masyarakat. Hal ini yang kemudian menjadi dasar dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam arti

sebagai pelaku fungsional. Atas pandangannya tersebut, Ter Heide kemudian berkesimpulan bahwa apabila hukum pidana dilepaskan konteksnya dari manusia, maka hal itu mengimplikasikan terhadap korporasi juga dapat dipidana, sehingga korporasi dapat ditempatkan dalam seluruh sistem hukum pidana.

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga terhadapnya dapat melakukan suatu tindak pidana, pada tahap selanjutnya menimbulkan pertanyaan terkait dalam hal seperti apa korporasi dapat dianggap sebagai pembuat. Roling mengajukan kriteria mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam teori pelaku fungsional. Menurut Roling, korporasi dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang dilarang, yang pertanggungjawaban pidananya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan dari korporasi tersebut.

Selanjutnya, mengenai keberadaan unsur kesalahan pada korporasi, Ter Heide berpendapat, bahwa dengan dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana tentunya membawa implikasi bahwa terhadap korporasi juga dapat dinyatakan bersalah. Kesalahan tersebut berasal dari tindakan secara sistematis yang dilakukan oleh korporasi. Sementara itu Suprpto berpendapat bahwa terhadap korporasi juga dapat diadakan suatu kesalahan. Kesalahan tersebut bisa didapat bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang

yang menjadi alatnya. Kesalahan tersebut sifatnya kolektif, bukan individual karena berkaitan dengan korporasi sebagai suatu kolektif.

Pendapat lain dikemukakan oleh Remmelink dan Bemmelen. Berangkat dari pendapat yang dikemukakan oleh Hulsman dalam preadvisnya, bahwa kesalahan dari korporasi dapat timbul dari kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan korporasi, baik dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Kerjasama tersebut harus memiliki sangkut paut tertentu antara tindakan dari orang-orang tersebut. Dengan demikian, menurut Bemmelen dan Remmelink terhadap korporasi, adanya pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan dari korporasi tersebut, jika mungkin dimungkinkan sebagai kesengajaan bersyarat. Selain itu kesalahan korporasi juga dapat diadakan dari kesalahan-kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, yang jika dikumpulkan akan mendapat sebuah kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.

Dalam menanggapi korporasi sebagai pelaku fungsional, Remmelink berpendapat bahwa perlu juga diperhatikan adanya delik-delik fungsional sebagai dasar untuk dijadikannya korporasi sebagai pembuat sehingga terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Adapun yang dimaksud delik-delik fungsional adalah delik-delik yang berasal dari lingkup atau suasana sosial ekonomi, dimana dicantumkan syarat-syarat bagaimana aktivitas sosial atau ekonomi

tertentu harus dilaksanakan dan terarah / ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu. Dengan demikian, delik-delik fungsional dianggap lebih cocok untuk diterapkan terhadap korporasi.

Dari teori pelaku fungsional tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada korporasi dapat melakukan tindak pidana dalam bentuk perbuatan fungsional. Selain itu terhadap korporasi juga dapat diadakan kesalahan atas dasar kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh alat-alat korporasi melalui suatu rangkaian perbuatan dalam lingkup korporasi.

## **5. Aggregation Doctrine**

Doktrin ini merupakan tanggapan terhadap doktrin identifikasi yang dianggap kurang dapat mengatasi realitas proses pengambilan keputusan dalam banyak perusahaan modern. Oleh karena itulah disarankan beberapa metode alternatif untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana suatu korporasi, salah satunya adalah aggregation doctrine. Ajaran ini memungkinkan aggregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Tindak pidana yang dilakukan seseorang digabungkan dengan kesalahan orang lain, atau dengan kata lain ia merupakan akumulasi kesalahan atau kelalaian yang merupakan sikap kalbu.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Sutan Remy Sjahdeini, Op.Ci.t, hlm. 110.



Apabila dalam identification doctrine cukuplah untuk dapat menemukan hanya satu orang yang perbuatannya dapat diatributkan kepada perusahaan, maka dalam ajaran agregasi diharuskan untuk menemukan beberapa orang yang agregasi dari perbuatan mereka secara keseluruhan diatributkan sebagai perbuatan perusahaan. Dengan demikian, teori agregasi ini sesungguhnya mengabaikan realitas bahwa esensi riil dari suatu perbuatan yang salah mungkin saja bukan berupa penyatuan dari apa yang telah dilakukan oleh tiap-tiap orang, tetapi berupa fakta bahwa perusahaan tidak memiliki kebijakan untuk dapat mencegah seseorang dalam perusahaan itu untuk melakukan suatu perbuatan yang secara kumulatif merupakan suatu tindak pidana.

#### **6. Corporate Cultural Model**

Doktrin ini diterapkan di Australia, menggantikan konsep vicarious liability yang sebelumnya dianut hingga tahun 1995. Pertanggungjawaban pidana yang berbasis pada “budaya korporasi”, mengutip pendapat Alvi Syahrin diartikan sebagai tingkah laku, kebijakan, peraturan, maksud dari suatu langkah ataupun kegiatan yang terdapat dalam lingkungan perusahaan itu secara umum atau dalam bagian lain dari perusahaan tersebut dimana kegiatan yang relevan terjadi di dalam lingkup perusahaan.

Dalam ajaran corporate cultural model ini, Alvi Syahrin menyatakan terdapat unsur-unsur yang harus dapat dibuktikan, antara lain:

“suatu kebiasaan atau tingkah laku perusahaan yang memerintah, mendorong, mentoleransi ataupun membiarkan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan;” atau perusahaan tersebut gagal untuk mempertahankan suatu kegiatan yang sesuai dengan peraturan, perlu juga mengetahui bahwa dewan direktur “secara sengaja, mengetahui atau membiarkan terjadinya suatu tindakan atau secara terang-terangan atau diam diam memerintah atau mengizinkan suatu tindakan yang melanggar aturan.”<sup>38</sup>

Dengan kata lain, menurut corporate culture model ini tidak perlu ditemukan orang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum itu untuk dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan orang itu kepada korporasi<sup>202</sup> Sebaliknya, pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang harus bertanggung jawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan orang yang melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggung jawab.<sup>39</sup>

## 7. *Reactive Corporate Fault*

Fisse and Braithwaite sebagaimana dikutip oleh Clarkson menciptakan sebuah bentuk baru dari doktrin pertanggungjawaban korporasi, yaitu *reactive corporate fault*. Doktrin ini menyatakan bahwa disaat *actus reus* dari suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan oleh dan atas nama korporasi, pengadilan sepatutnya memiliki dasar untuk meminta korporasi melakukan investigasi untuk mencari tahu siapakah individu yang bertanggung jawab dan melakukan tindakan penegakan disiplin terhadap individu tersebut

<sup>38</sup>Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan Edisi Revisi, (Jakarta: Sofmedia, 2009), hlm 26

<sup>39</sup>Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hlm. 112.

serta melakukan koreksi atas kesalahan yang ia lakukan. Apabila korporasi melakukan koreksi maka korporasi tidak akan diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban korporasi hanya dapat diminta jika korporasi gagal untuk memenuhi perintah pengadilan. Kelalaian korporasi adalah apabila korporasi gagal bertindak secara wajar sesuai permintaan pengadilan terhadap perbuatan salah satu pegawainya.

8.

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

#### **C.1 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>40</sup>

Tindakan pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang menyebabkan terjadinya suatu tindak kriminal menyebabkan orang tersebut menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan nilai-

---

<sup>40</sup>Andi Hamzah. *Asas-asas hokum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.

nilai dalam masyarakat, norma hukum perundang-undangan yang berlaku.<sup>41</sup>

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Batasan penjelasan diatas sesuai dengan pendapat dari apa yang dikemukakan yang menyatakan bahwa tingkah laku yang jahat immoral dan anti social akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindakan kejahatan atau criminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka

---

<sup>41</sup>Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.2001

pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum akibat pembedaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap kesalahan si pembuat.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>43</sup>

### **C.2 Tindak Pidana Penipuan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), dengan maksud menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).<sup>44</sup> Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan

---

<sup>42</sup>Moeljatno. *Op. Cit*, hlm.126

<sup>43</sup>Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001 .hlm.30

<sup>44</sup>Ananda S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya. Kartika. 2009. hlm.364

atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepeningan dirinya atau kelompok.

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno bahwa barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R.Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian

kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>45</sup>

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut diatas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Terkadang penipuan juga sulit dibedakan dengan penggelapan, adapun perbedaan antara penipuan dan penggelapan yaitu, tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang

---

<sup>45</sup>R.Sugandhi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya. Usaha Nasional.1980.hlm. 396-397

kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif.

Kejahatan penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara



dengan mana pelaku mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.<sup>46</sup>

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk mengerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- a. Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
- b. Tipu muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- c. Martabat/keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu. Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak

---

<sup>46</sup>R. Soenarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHP*. Jakarta. Rajawali Pers. 1992. hlm. 241

cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya 8 Maret 1926, bahwa : Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.<sup>47</sup>

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberiutang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya Tanggal 25 Agustus 1923, bahwa harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus

---

<sup>47</sup>R. Soenarto Soerodibroto, *Ibid*, hlm. 241.

menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak, dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
  1. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya,
  2. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.<sup>48</sup>

Tafsir/penjelasan Pasal 378 KUHP tentang penipuan berdasarkan penjelasan Roesilo :

---

<sup>48</sup>Moeljatno. *Op Cit.* hlm. 70

- a. Membujuk : melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
- b. Memberikan barang : barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.
- c. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak : menguntungkan diri sendiri dengan berhak.
- d. Nama palsu : nama yang bukan namanya sendiri. Nama “saimin” dikatakan “zaimin” itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu.
- e. Keadaan palsu : misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb-nya yang sebenarnya ia bukan penjabat itu.
- f. Akal cerdas atau tipu muslihat : suatu tipuan yang demikian liciknys, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknys.
- g. Rangkaian kata-kata bohong : satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang

tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar.

- h. Tentang “barang” tidak disebutkan pembatas, bahwa barang itu harus kepunyaamn orang lain. Jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.<sup>49</sup>

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorangbaru dapat dikatakan melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalamPasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHPterpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidanasesuai perbuatannya.

### **C.3 Tindak Pidana Penggelapan**

Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau *vermogensdelicten* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari title XXIV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>R,Soesilo. *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal*.Bogor.Politeia.1996.hlm.261.

<sup>50</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam Kuhp*. Sinar Grafika, Jakarta 2009 Hlm 88

Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak).

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :*“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan...”*.<sup>51</sup>

Tindak pidana yang tercantum di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti Pasal 372 ditambah bagian inti lain.

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Unsur-unsur *objektif* dalam Pasal 372 adalah:

1. Perbuatan memiliki. *Zicht toe.igenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku

---

<sup>51</sup>Pasal 372, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sebagai milik. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

2. Unsur objek kejahatan (sebuah benda). Benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud seperti dalam pencurian
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh

orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Arrest Hoge Raad tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya.

4. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan : menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang



terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).<sup>52</sup>

Sedangkan unsur-unsur *subjektifnya* adalah:

1. Unsur kesengajaan. Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu.
2. Unsur melawan hukum. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yaitu melawan hukum formil (bertentangan dengan hukum tertulis) dan melawaqn hukum materiil (bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat). Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan petindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini.

---

<sup>52</sup>Ibid, Hlm 171

Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang *pertama*, Tindak pidana penggelapan barang (*Verduistering*) dalam bentuk pokok, termuat dalam Pasal 372 KUHPidana; *kedua*, Tindak pidana penggelapan ringan (*Lichte Verdustering*), termuat dalam Pasal 373 KUHPidana; *ketiga*, Tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan (*Gequalificeerde Verduistering*), termuat dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana; *dan yang keempat*, Tindak pidana penggelapan dalam keluarga, termuat dalam Pasal 376 KUHPidana;

Dari pasal-pasal tindak pidana penggelapan seperti yang telah disebutkan diatas ( Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375 dan Pasal 376 KUHPidana), yang terkait dengan judul penulis adalah Pasal 374 KUHPidana yang berbunyi, “*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena suatu pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun*”.<sup>53</sup>

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *gequalificeerde verduistering* atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan.<sup>54</sup> Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372);

<sup>53</sup> Pasal 374, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

<sup>54</sup> P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2009 Hlm 133

2. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan, *yang pertama*, Karena adanya hubungan kerja, kedua Karena mata pencaharian, dan yang *ketiga* Karena mendapatkan upah untuk itu.

Menurut *Cleiren*, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah<sup>55</sup>, inti penggelapan ialah “penyalahgunaan kepercayaan, Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu”.

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu.

Selain diterjemahkan dengan mata pencaharian, *beroep* adakalanya diterjemahkan sebagai “karena jabatan atau dengan pekerjaan, adalah suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu di mana seseorang itu melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu”.<sup>56</sup>

Dalam Pelaksanaan pekerjaan atau tugas yang terbatas dan tertentu ini adalah merupakan ciri dari suatu mata pencaharian, seorang kasir atau bendaharawan adalah merupakan pekerjaan yang tertentu dan terbatas,

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm 107

<sup>56</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm 86

ialah sebagai pemegang dan pengurus keuangan dari suatu perusahaan atau jawatan. Ia tidak berfungsi dan bertugas lain di luar/pekerjaan yang menyangkut keuangan. Hubungan antara dia dengan uang yang diurus dan menjadi tanggung jawabnya adalah berupa hubungan menguasai/kekuasaan, yang timbul karena adanya jabatannya sebagai kasir/bendaharawan. Apabila menyalahgunakan uang yang menjadi tanggung jawab dan berada dalam pengurusannya itu, misalnya membelikan sepeda untuk anaknya, maka di sini telah terjadi penggelapan.<sup>57</sup>

#### **C.4 Tindak Pidana Pencucian Uang**

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah *money laundering* tidak memiliki definisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh

---

<sup>57</sup>*Ibid*, Hlm. 88

darihasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>58</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP- TPPU) disebutkan bahwa, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsurpidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan yang di maksudadalah perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau suratberharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi :<sup>59</sup>

#### 1. Pelaku

Dalam UU PP-TPPU digunakan kata "setiap orang" dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa "setiap orang adalahorang perseorangan atau korporasi". Sementara pengertiankorporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakanbahwa "korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yangterorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badanhukum". Dalam Undang-Undang ini,

<sup>58</sup>Adrian Sutedi, 2008, *Tindak pidana pencucian uang*. PT. Citra aditya bakti., bandung, Hlm 12

<sup>59</sup>M. Arief Amrullah, 2010, *Tindak Pidana Money Laundering* , Banyumedia Publishing., Malang, Hlm. 25-27

pelaku pencucian uang uangdibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsungmelakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orangyang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiaporang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uangakan dianjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikanatau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadiharta kekayaan yang sah.

Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi

keuangan mencurigakan. Definisi “transaksi keuangan mencurigakan” dalam Pasal 1 angka 5 UU PP-TPPU adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari PenggunaJasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut didugadilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporanTransaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan olehPihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukandengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasaldari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untukdilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan HartaKekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

3. Perbuatan Melawan Hukum

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PP-TPPU, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>ibid